

# PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAN MODERNISASI DALAM PEMBANGUNAN

WAWAN HERNAWAN<sup>1</sup>

## Abstract

*Culture is the creation of a society devoted to the interests of society in order to continue to exist and thrive. Culture reflects human responses to life's basic needs. In terms of content or komponennya, culture can be identified into five principal, the ideas, norms of ideology, technology, and materials. The components of culture is always changing, whether the changes are slow and rapid changes in the nature. Socio-cultural changes occur because of pressure from a variety of factors, whether originating from within the community itself, as well as from outside the community. Change is a condition that we experience in every aspect of life.*

*Like it or not, the change tends to take place every turn. In the era of information technology, a rapid change of pace. Although it seems every change promises many benefits, but it is quite clear that the promise would be realized if all the people in charge of the work was trying hard to realize that promise. communication through the mass media both print and electronic media, providing a crucial role in the political culture of social change. In line with the modernization of its speed of movement, means of communication, in this case the mass media communication needs serious attention. Planning well in the field of communications relating to software and hardware should be in line with the development of motion.*

*This can be understood as a means of communication other than to express opinions in connection with the ideas of renewal, as well as an effective mediator in bridging the government by the people. At least three ways that can be taken by the mass media to influence cultural norms. First, mass communication messages can reinforce cultural patterns prevailing and guiding the public to believe that these patterns are still in effect and adhered to the public. Second, the media can create a new cultural patterns that do not conflict with the existing culture, and even improve it. Third, the mass media can change the cultural norms that apply to the behavior of individuals in society changed at all. These messages are not a bit of development which is distributed to the public through various media, so that people accept and support the development of movement in every aspect of life that has been programmed by the government.*

**Key word: media & social change**

---

<sup>1</sup>Staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Bandar Lampung.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Dalam tulisan ini dibahas masalah komunikasi massa dalam hubungannya dengan perubahan sosial budaya, modernisasi dalam konteks pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses komunikasi disebarkan suatu ide (lama ataupun baru) yang diharapkan dapat diterima oleh komunikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Bagi suatu ide lama dapatlah dipahami bahwa selama ide tersebut dapat dihayati oleh kelompok yang bersangkutan, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya, suatu ide baru; seperti ide-ide pembangunan yang mengarah kepada modernisasi akan mengakibatkan perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ide pembaharuan dalam konsep pembangunan tidak mudah menggantikan atau menggeser ide/nilai lama yang sudah tertanam di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka media massa sangat diharapkan kehadirannya untuk menempati posisi strategis dan menjalankan peranannya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang ide pembaharuan. Melalui pemahaman ide pembaharuan tersebut, setidaknya dapat mencegah terjadinya konflik-konflik di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama yang di dalamnya berlangsung proses kehidupan sosial. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan tatacara berpikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat warga masyarakat tersebut menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan kelompok. Heterogenitas dalam suatu masyarakat menunjukkan adanya kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat sebagai suatu konsekuensi dari posisi, status,

ataupun kedudukan seseorang didalam masyarakatnya. Heterogenitas dan kelas sosial warga masyarakat inilah yang cenderung menjadi kriteria atau ukuran dalam menilai tingkat modernitas masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, realita heterogenitas ini merupakan perwujudan tingkat kebudayaan.

Konsep awal tentang kebudayaan berasal dari *E.B.Taylor*, yang mengemukakan bahwa *culture* atau *civilization* itu ialah “*complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits aquired by man as a member of society*”. Batasan tentang kebudayaan ini diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup aspek pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian *Ralph Linton* memberikan sebuah batasan budaya yang lebih spesifik, yaitu “*A culture is the configuration of learned behavior and results of whose components elements are shared and transmitted by the members of a particular society*”. Pernyataan ini mengandung makna bahwasanya kebudayaan atau budaya dianggap sebagai milik khas dari manusia, walaupun berbagai studi yang dilakukan kemudian tentang ‘*non human primate*’ mempersoalkan pernyataan ini.

Sedangkan *A.L. Kroeber* menganggap bahwa kebudayaan itu memiliki sifat-sifat yang *superorganik*, yaitu keberadaannya telah mengatasi keberadaan dari setiap individu atau organik, yang artinya walaupun kebudayaan itu dilakukan oleh semua orang tetapi wujud atau keberadaannya bebas dari individu tertentu. Dalam konteks manajemen *Leslie White* mengajukan batasan tentang kebudayaan bahwa kebudayaan itu merupakan simbol-simbol yang bergantung kepada pemakaiannya, yaitu suatu organisasi gejala-gejala (pola tingkah laku), obyek

(alat pertukangan dan produksinya), ide-ide (kepercayaan dan ilmu pengetahuan, dan sentimen (sikap dan nilai). Dengan demikian menurut *White* kebudayaan itu bermula dari wujudnya manusia dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya yang diakibatkan oleh hakekat kebudayaan yang simbolik itu. Sedangkan *Cliffort Geertz* memandang kebudayaan sebagai *perangkat mekanisme kendali untuk mengatur kelakuan*, karena itu manusia sangat bergantung kepada kebudayaannya untuk dapat mewujudkan dan mengatur kelakuannya. Kebudayaan adalah hasil kreasi suatu masyarakat yang ditujukan pada kepentingan kehidupan masyarakat tersebut agar tetap eksis dan berkembang. Kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya.

Secara lebih terperinci Kuntjaraningrat (1974) membagi ruang lingkup kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Nilai-nilai budaya ini merupakan jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan. Disamping nilai-nilai budaya ini, kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia dalam mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Pada dasarnya tata hidup merupakan pencerminan yang konkrit dari nilai budaya yang bersifat abstrak. Di samping itu nilai budaya dan tata hidup manusia ditopang oleh perwujudan kebudayaan yang berupa sarana kebudayaan. Sarana kebudayaan ini merupakan alat yang memberikan kemudahan dalam berkehidupan.

Allport, Vernon, dan Lindzey (1951) mengemukakan ruang lingkup kebudayaan terbagi kedalam enam nilai dasar, yakni nilai teori (hakekat penemuan kebenaran lewat berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme dan metode

ilmiah), ekonomi (mencakup kegunaan dari berbagai benda dalam memenuhi kebutuhan manusia), nilai estetika (berhubungan dengan keindahan dan segi-segi artistik), nilai sosial (berorientasi kepada hubungan antar manusia dan penekanan segi-segi kemanusiaan yang luhur), nilai politik (berpusat pada kekuasaan dan pengaruh baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia politik), dan nilai agama (penghayatan yang bersifat mistik dan transendental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi arti bagi kehadirannya di muka bumi).

Dilihat dari segi isi atau komponennya, kebudayaan dapat diidentifikasi menjadi lima pokok, yaitu gagasan, norma ideologi, teknologi, dan materi.

Komponen-komponen kebudayaan tersebut selalu mengalami perubahan, baik perubahan yang bersifat lambat maupun perubahan yang bersifat cepat. Dengan kata lain, perubahan tersebut ada yang bersifat evolusioner dan ada yang bersifat revolusioner. Dalam arti sosial budaya perubahan yang bersifat evolusioner tercermin dalam perubahan sosial, politik, ekonomi yang bersifat gradual dan relatif damai. Sedangkan perubahan yang bersifat revolusioner mencerminkan perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi yang relatif cepat, fundamental dan relatif mengejutkan.

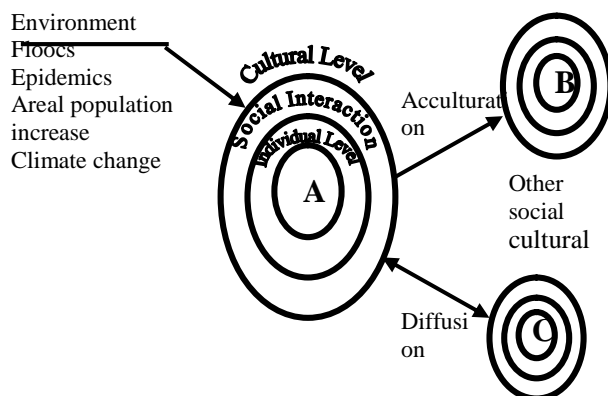
## 2. Perubahan Sosial Budaya

Organisasi sosial masyarakat manusia secara evolusioner telah tumbuh dari bentuk organisasi sosial kelompok seketurunan yang hidup sebagai pemburu dan pengumpul hasil hutan, berkembang menjadi organisasi sosial kelompok sesuku atau serumpun yang hidup secara egaliter, komunal, dan berladang berpindah-pindah. Semakin bertambah jumlah penduduk, maka semakin kompleks organisasi sosialnya, tempat tinggal mulai menetap, stratifikasi sosial mulai menajam dan berkembanglah organisasi sosial kehidupan

kemasyarakatan dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Dari bentuk kehidupan sosial tersebut, maka berkembang menjadi bentuk organisasi sosial kenegaraan yang didalamnya terdiri dari kelas-kelas penguasa, kelas-kelas yang berdasarkan keagamaan, ekonomi, dan birokrasi.

Perubahan sosial budaya terjadi karena adanya dorongan dari berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun yang berasal dari luar masyarakat. Menurut Murdock (1960), faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan sosial budaya adalah: (1) penambahan atau pengurangan penduduk, (2) perubahan lingkungan geografis, (3) perpindahan ke lingkungan baru, (4) kontak antar kebudayaan, (5) malapetaka alam dan sosial, seperti banjir, kegagalan panen, epidemi, perang, dan depresi ekonomi, (6) kelahiran atau kematian seorang pemimpin, dan (7) penemuan (inovasi).

Dalam memandang faktor-faktor yang merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, Spindler (1975) mengemukakan model sebagai berikut:



Model Spindler di atas memperlihatkan secara analitis berbagai faktor yang berinteraksi dalam proses perubahan sosial budaya. Pada gambar di atas terlihat sebuah sistem sosial budaya yang berhubungan dengan beberapa sistem sosial budaya lainnya. Dalam sistem sosial budaya itu sendiri terdapat empat komponen yang berinteraksi, yaitu: individu, interaksi sosial, lingkungan dan

kebudayaan itu sendiri. Interaksi dari berbagai komponen tersebut digambarkan oleh panah yang menuju ke kedua arah.

Kontak langsung antara dua sistem sosial budaya akan menimbulkan perubahan pada keduanya. Berapa besar perubahan yang terjadi masing-masingnya akan sangat tergantung pada ukuran dan prestise relatif dari kedua kebudayaan yang berhubungan. Proses perubahan dengan cara ini akan dinamakan akulturasi. Kontak budaya ini telah menyebabkan terdapatnya berbagai persamaan diantara berbagai kebudayaan.

Berhubungan erat dengan akulturasi ini adalah difusi atau peminjaman unsur-unsur budaya. Proses peminjaman tidak memerlukan kontak langsung antara orang-orang dari kedua kebudayaan yang berlainan. Berbagai saluran komunikasi dapat jadi perantara penyebaran gagasan-gagasan dari berbagai sumber. Perubahan lingkungan fisik seperti adanya banjir, epidemi, penambahan penduduk, perubahan iklim dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; yaitu kemajuan sosial budaya dapat membawa perubahan pola lingkungan fisik sebuah sistem sosial budaya.

Bentuk interaksi sosial tertentu yang diciptakan sebuah kelompok kecil dalam sebuah sistem sosial budaya dapat membawa perubahan bilamana pola interaksi kelompok kecil tersebut dijadikan model atau pola umum bagi kegiatan sejenis dalam masyarakat yang bersangkutan. Umpamanya cara pengorganisasian sistem pengairan sebuah masyarakat desa diadopsi oleh masyarakat secara keseluruhan.

Penemuan (inovasi) yang diciptakan oleh seseorang dapat menjadi sumber perubahan interaksi sosial dan perubahan sistem sosial budaya. Menurut Woods (1975), ada empat bentuk inovasi dalam perubahan sosial budaya, yaitu: (1) variasi jangka panjang, (2) penemuan/discovery, (3) penciptaan/invention, (4) difusi. Variasi jangka panjang merupakan

perubahan-perubahan kecil yang perlahan dan menumpuk dalam pola berpikir dan pola perilaku yang ada yang menghasilkan sesuatu yang secara kualitatif akan mengambil bentuk baru. Penemuan mencakup adanya kesadaran akan adanya sesuatu yang baru yang sebelumnya telah ada. Sedangkan penciptaan/invention merupakan sistem baru dari benda-benda, kondisi-kondisi dan praktek-praktek. Diffusi/peminjaman merupakan bentuk inovasi yang paling umum. Peminjaman berbagai elemen baik material maupun non-material telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat antar-bangsa.

Inovasi merupakan proses mental yang timbul karena dirasakan adanya dorongan tertentu oleh seseorang untuk berbuat sesuatu sebagai akibat adanya tantangan dari perubahan lingkungan, atau dirasakan adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kondisi demikian mendorong seseorang untuk menemukan sesuatu yang baru dengan cara mengubah apa yang telah ada, mengadakan kombinasi baru atau menciptakan sama sekali yang baru.

### **3. Modernisasi dan Pembangunan Sosial Politik Ekonomi**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa perubahan sosial budaya ada yang bersifat evolusioner dan ada yang bersifat revolusioner. Gerakan perubahan secara revolusioner pertama kali tampil dalam dalam revolusi-revolusi besar di Eropa; sebagai contoh: pemberontakan besar dan revolusi di Inggris (1688), revolusi Amerika (1761-1766), revolusi Perancis (1787-1799). Revolusi-revolusi tersebut telah mempengaruhi gambaran diri (*self image*) masyarakat modern. Black (1966) mendefinisikan modernisasi sebagai proses yang menggambarkan institusi-institusi yang lahir secara historis disesuaikan dengan fungsi-fungsinya yang berubah dengan cepat yang merefleksikan penambahan pengetahuan orang yang

belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah memungkinkan orang mengontrol lingkungannya, yang menyertai revolusi ilmu pengetahuan. Menurut J.W. Schoor (1981) merumuskan modernisasi masyarakat sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau kepada semua aspek-aspek masyarakat.

Secara struktural, setiap revolusi besar ditandai oleh suatu hubungan yang erat antara heterodoksi, pemberontakan, perjuangan politik dan pembangunan kelembagaan. Gerakan revolusi ini berkaitan erat dengan penyusunan sejumlah simbol-simbol dan batas-batas kolektivitas politik dan kebudayaan. Dari proses revolusi tersebut berkembang beberapa tipe transformasi masyarakat yang unik dan pada akhirnya suatu peradaban: peradaban modernitas. Revolusi modern mendorong masyarakat ke arah modernisasi dalam aspek-aspek organisasi dan simbolis. Seluruh masyarakat pasca revolusioner mengalami pertumbuhan diferensiasi struktural dan spesialisasi dengan berdirinya kerangka keorganisasian universalistis; perkembangan ekonomi pasar industrial atau semi industrial; perkembangan sistem stratifikasi non-tradisional dan mobilitas yang relatif terbuka dimana kriteria *achievement* secara umum dan kriteria ekonomi, pekerjaan dan pendidikan khususnya, menjadi unsur yang dominan; dan timbulnya sistem politik terpusat dan sangat birokratis.

Transformasi sosial dalam hal ini memang terjadi pada seluruh masyarakat modern dan masyarakat yang sedang menjalani modernisasi; yang membedakan proses transformasi sosial dalam masyarakat revolusioner tidak hanya karena mereka berlangsung melalui pergolakan kekerasan, melainkan juga karena perubahan ini dan transformasinya berjalan dalam suatu konstelasi khusus. Terdapat titik temu perubahan-perubahan, setidaknya dalam aturan-aturan dasar

interaksi sosial (prinsip keadilan distributif; makna kegiatan kelembagaan; keabsahan tatanan sosial) dan terutama sekali perpaduan perubahan tersebut dengan perubahan dalam penataan kembali akses kekuasaan dan dalam perbaikan pusat, baik simbol-simbolnya maupun pola keabsahannya. Perubahan dalam bidang politik itu sendiri terbentuk dalam pola tertentu; yakni: dalam kombinasi perubahan simbol dan pola keabsahan suatu rezim; dalam komposisi kelas yang berkuasa; dalam basis akses ke pusat; dan dalam hubungan pusat dengan pinggiran.

Kombinasi dimensi-dimensi simbolis dan struktural dari modernitas menyebabkan lahirnya satu ciri yang terpenting; yaitu peradaban modern yang jauh berbeda dengan sistem tradisional. Masyarakat modern seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang menyangkut kemampuannya untuk mengembangkan kerangka sentral peradaban modern. Tuntutan atau harapan pengembangan seperti itu, meskipun nantinya saling berbeda arah, tetapi sesungguhnya saling berkaitan. Diantaranya, pertama, berupa aspirasi biasanya dari kalangan elit – bagi penciptaan atau pemeliharaan kerangka politik baru yang lebih luas. Kedua, ialah aspirasi atau tuntutan bagi pembangunan ekonomi dan administratif atau yang disebut modernisasi. Ketiga, berupa harapan agar pusat menanggapi berbagai tuntutan kelompok sosial baru – terutama tuntutan dari kelompok tersebut – kalangan elit khususnya agar bisa terlibat ke pusat. Hal ini dimaksudkan untuk merumuskan kembali batas-batas dan simbol-simbol kolektivitas dan supaya lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik maupun akses langsung ke pusat.

Erat kaitannya dengan kecenderungan di atas adalah perubahan format perjuangan politik yang berlangsung dalam kerangka kelembagaan politik modern – suatu aspek yang paling sanggup merembes ke dalam struktur

tuntutan politik dari sistem politik modern. Kandungan konkrit dari tuntutan tersebut memang sangat beragam sesuai dengan kondisi strukturalnya, seperti urbanisasi, perubahan sektor pertanian, maupun perluasan sektor pendidikan. Namun masyarakat modern cenderung mengembangkan pola-pola tuntutan umum yang lebih sistematis. Satu pola yang mudah ditemukan ialah meningkatnya kuantitas tuntutan. Hal ini erat kaitannya dengan peningkatan dalam sejumlah saluran yang memungkinkan bagi akses sumber-sumber (misalnya penekanan yang umum terhadap saluran-saluran pendidikan bagi akses ke posisi-posisi politik atau birokratis) dan jangkauan kelompok-kelompok dan strata masyarakat yang lebih luas dalam mengartikulasikan tuntutan-tuntutan ke pusat secara politis. Selain perbedaan kuantitatif ini, kelompok-kelompok yang luas dalam masyarakat modern tidak hanya memisahkan permintaan keuntungan konkrit yang didasarkan pada perbedaan keanggotaan dengan berbagai askriptif, yaitu sub-kolektivitas tertutup juga membutuhkan akses ke pusat berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Tuntutan ke pusat ini berdasarkan keikutsertaan dan orientasi konsensus yang inheren dalam premis-premis modernitas dan yang merupakan bagian dari proses politik. Maksudnya tuntutan kepada pusat-pusat tatanan sosial dan politik ini kelihatan jelas dalam penataan kembali tipe-tipe utama organisasi politik dalam masyarakat modern dan dalam kecenderungan ke arah perpaduan diantaranya (perpaduan yang meningkatkan kepada, dan berhubungan dengan pembangunan sebagai gerakan pemberontakan, heterodoksi intelektual, gerakan-gerakan protes, serta perjuangan politik sentral yang terbentuk dalam revolusi-revolusi besar).

Diantara sejumlah tipe khusus organisasi yang mengartikulasikan tuntutan-tuntutan politik dalam

masyarakat modern adalah kelompok-kelompok kepentingan, gerakan-gerakan nasional, opini publik dan partai-partai politik. Tiga yang pertama sampai tahap tertentu dianggap sebagai komponen dari yang terakhir; yakni, bahwa partai merupakan bentuk yang paling artikulatif dari organisasi politik modern. Namun juga terdapat tumpang tindih diantara keempat tipe tersebut.

Kelompok kepentingan atau kelompok penekan biasanya berorientasi untuk mencapai tujuan-tujuan konkrit (ekonomi, agama, kebudayaan atau politik) dan tertarik kepada perangkat politik yang lebih luas dari suatu partai atau negara, sepanjang yang terakhir ini dapat mendukung tujuan-tujuannya. Memang terdapat tipe kelompok-kelompok kepentingan, demikian pula kepentingan-kepentingan khusus mereka biasanya sangat beragam dari situasi yang satu ke situasi lainnya.

Tipe kedua organisasi dalam sistem politik modern ialah gerakan-gerakan sosial. Ada beberapa tipe gerakan sosial yang dapat dibedakan. Pertama ialah, gerakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan umum yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan konkrit suatu kelompok artikulasi tertentu, melainkan mengetengahkan diterapkannya prinsip keadilan yang lebih luas; misalnya gerakan yang menentang perlakuan modal (*capital punishment*), untuk membenahi sejumlah kelompok yang tercerabut dari masyarakatnya (ibu-ibu yang tidak kawin, para penjahat), atau untuk menghapus perbudakan. Tipe yang kedua ialah gerakan pembaharuan, yang bertujuan mengubah kelembagaan politik sentral. Misalnya perluasan hak pilih pada kelompok khusus (Tipe kedua gerakan sosial ini seringkali merupakan unsur yang penting dalam opini publik). Yang ketiga dan merupakan tipe yang sangat ekstrim dalam gerakan sosial adalah gerakan ideologis. Suatu gerakan totalitas yang biasanya mengarah pada

pengembangan segenap masyarakat atau pemerintahan yang benar-benar baru. Gerakan ini berusaha menanamkan nilai-nilai atau tujuan yang inklusif dan menyebarkan kedalam struktur kelembagaan tertentu atau untuk mengubah struktur tersebut sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan tersebut. Gerakan ini biasanya memiliki orientasi ke masa depan yang sangat kuat dan cenderung melukiskan masa datang sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari yang ada sekarang dan selalu berjuang untuk merealisasikan perubahan yang dicita-citakannya. Kerap kali gerakan ini bersifat apokaliptis atau millenarian. Tegasnya ia cenderung menuntut suatu ketaatan total atau kesetiaan total pihak anggotanya dengan membedakan secara tegas-tegas antara teman dengan musuh.

Saluran ketiga yang mengartikulasikan tuntutan politik modern dapat dikenali sebagai bersifat umum menyebar, dan mempunyai kepentingan-kepentingan kuat terhadap isu-isu publik dan barang-barang milik umum. Ini merupakan orang-orang atau kelompok yang mempunyai sifat lebih fleksibel, baik terhadap kepentingan-kepentingan yang khusus maupun terhadap tuntutan-tuntutan dan gagasan-gagasan yang menyeluruh, yang tidak ada di dalam kelompok-kelompok kepentingan, gerakan atau organisasi lainnya, dan yang semata-mata didorong oleh kepentingannya akan barang milik umum, serta mengevaluasi program-program politik atas dasar nilai-nilai yang lebih luas maupun kemungkinan-kemungkinan konkritnya.

Bentuk-bentuk dari artikulasi, kepentingan politik dan orientasi politik ini telah ada dalam sistem tradisional. Namun dengan pengecualian parsial terhadap permohonan-permohonan dari kelompok kepentingan, representasi kegiatan-kegiatan politik dan orientasi kelompok-kelompok sosial masyarakat tersebut tidaklah sepenuhnya di absahkan di dalam kelembagaan politik sentral,

sementara gerakan-gerakan sosial atau gerakan sosial keagamaan sebagian besar bersikap apolitis atau tidak absah di lihat dari sudut pandang lembaga-lembaga politik yang ada.

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Bangsa Barat telah membawa bangsa-bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan dunia, pembukaan dan pendudukan serta penjajahan daerah-daerah di Amerika, Australia, Afrika, dan Asia. Penguasaan dan kontak budaya, selain telah memperkaya bangsa-bangsa penjajah dan mempermiskin bangsa-bangsa terjajah, juga memperkenalkan secara terbatas kepada penduduk setempat ilmu pengetahuan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Bermodalkan semangat untuk merdeka kembali dan dibekali dengan ilmu-ilmu Barat, pemimpin-pemimpin bangsa terjajah bersama masyarakat melakukan perjuangan kemerdekaan.

Kemerdekaan politik yang diperoleh bangsa-bangsa di dunia ketiga membawa tanggung jawab pembangunan yang luas. Penjajah telah membuat mereka miskin dan terbelakang dalam semua aspek kehidupan. Eksploitasi yang berlangsung berabad-abad lamanya telah membunuh citra mereka sebagai bangsa dan kreativitas mereka sebagai manusia. Selain itu, institusi-institusi politik sebagai alat untuk menggerakkan usaha pembangunan bangsa merupakan masalah tersendiri yang cukup memerlukan waktu untuk membangunnya. Kemiskinan dan keterbelakangan mewarnai semua aspek kehidupan lainnya, seperti kehidupan ekonomi, sosial, intelektual, dan psikologis. Kemiskinan dan keterbelakangan yang paling dirasakan adalah dalam bidang ekonomi. Jurang kesejahteraan antara masyarakat bekas penjajah dengan masyarakat bekas terjajah, sangat kontras terlihat. Negara bekas penjajah disebut negara maju, sedangkan negara bekas terjajah disebut negara yang belum berkembang atau terbelakang.

Pembangunan ekonomi dalam arti luas adalah proses peningkatan perkapita suatu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Pengalaman negara-negara maju dalam hal ini adalah negara-negara barat terutama negara-negara bekas penjajah menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perkapita yang tinggi, menunjukkan pula kesejahteraan yang tinggi yang telah mereka capai adalah hasil transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, yang didalamnya revolusi intelektual merupakan titik kunci. Revolusi dalam ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi yang mendorong terjadinya revolusi industri dan disusul dengan revolusi dalam bidang politik. Hasil akhir dari kesemuanya adalah pendapatan perkapita yang tinggi, sistem politik berdasarkan demokrasi dengan tingkat kesejahteraan sosial mayoritas, memiliki sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana komunikasi yang berkualitas

Pengalaman pembangunan ekonomi Amerika Selatan memperlihatkan bahwa perdagangan internasional tidak pernah memberikan keuntungan pembangunan bagi negara-negara bekas terjajah. Hubungan ekonomi antara negara bekas penjajah dengan negara bekas terjajah melahirkan ketergantungan ekonomi, sehingga kunci-kunci perekonomian tetap dipegang dan dikendalikan oleh mereka (negara bekas penjajah). Perimbangan harga barang yang diekspor oleh negara bekas terjajah dalam bentuk hasil pertanian, dengan harga barang-barang industri yang diimpor dari negara bekas penjajah selalu merugikan negara bekas jajahan. Kondisi demikian akan lebih memperlebar dan memperparah jurang antara negara kaya dengan negara miskin. Karenanya, sebagai upaya melepaskan dari keadaan ketergantungan tersebut, kebijaksanaan dalam pembangunan politik sosial ekonomi harus diubah. Pengalaman-pengalaman negara-negara barat dalam pembangunan politik sosial ekonomi



budaya dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran dengan paradigma modernisasinya. Namun, paradigma mana pun yang digunakan oleh negara-negara berkembang dalam pembangunan sosial politik ekonominya, hal yang paling pokok harus dilakukan adalah pembangunan manusia-manusianya sebagai sumber daya pokok pelaksana pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya perencanaan pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan memerlukan tenaga-tenaga ahli dan terampil guna melahirkan dan menggunakan teknologi modern. Pemerintahan yang stabil dan birokrasi yang berkualitas pun sangat diperlukan sebagai tenaga pendorong bagi percepatan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan tersebut. Maka tantangan besar dalam perencanaan pembangunan adalah menerjemahkan konsep kedalam tindakan; dengan demikian analisis tentang perubahan adalah faktor yang terpenting. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penghematan anggaran belanja telah memicu masalah yang berkaitan dengan perubahan teknologi. Perubahan adalah kondisi yang kita alami dalam setiap aspek kehidupan. Suka atau tidak suka, perubahan cenderung berlangsung setiap menoleh. Dalam era teknologi informasi, derap perubahan menjadi cepat. Walaupun kelihatannya setiap perubahan menjanjikan berbagai keuntungan, tetapi cukup jelas bahwa janji itu akan terwujud jika semua orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu berusaha keras untuk mewujudkan janji tersebut. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa orang cenderung mendukung perubahan yang telah dirancang dan dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Setiap perubahan yang dirancang oleh orang lain, cenderung dilihat sebagai perubahan yang dipaksakan. Perubahan yang dipaksakan cenderung menimbulkan pembangkangan daripada komitmen.

Dalam kenyataannya, nyaris tidak ada jalan pintas. Sebuah organisasi menghendaki agar para karyawannya memahami apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan bagaimana hubungan pekerjaan mereka dengan pekerjaan orang lain. Nampaknya sangat jujur, tetapi berat untuk menerimanya dan orang harus belajar dari pengalaman mereka sendiri, bukan dari orang lain. Mereka harus diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman mereka sendiri dan menemukan untuk diri mereka sendiri.

Dalam mengembangkan dan menerapkan strategi kompleks teknologi informasi, harus diperhatikan secara memadai mengenai pengaruh perubahan besar yang diberlakukan terhadap sumber daya manusia yang merupakan investasi utama. Setiap perencanaan yang bermaksud mengembangkan teknologi informasi, harus dapat mengarahkan perhatian manajemen dan *end-user* kepada tujuan-tujuan baru. Jika perencanaan jangka panjang teknologi informasi dilakukan oleh manajemen, maka keterbukaan untuk menerima ide dan pemikiran baru haruslah dilembagakan. Teknologi informasi yang efektif akan membutuhkan perubahan-perubahan besar dalam struktur fungsi yang ada, sehingga pemahaman terhadap perubahan dan cara bagaimana orang bereaksi terhadap perubahan itu adalah komponen strategis yang amat penting.

Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi memerlukan spesialis yang melahirkan dan merawatnya. Hal ini merupakan suatu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Manusia adalah investasi dari mana keuntungan yang memadai harus diperoleh. Tujuan dari perencanaan tenaga kerja yang efektif bagi lingkungan teknologi informasi adalah untuk menjaga teknik dan pengetahuan guna pelaksanaan pembangunan sosial ekonomin yang

memadai, meskipun dalam peran-peran baru dan untuk meramalkan kebutuhan serta keahlian baru lebih banyak sektor-sektor usaha yang perlu menerapkan aspek manajemen sumber daya manusia ini.

Efektivitas manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia dalam lingkungan teknologi informasi yang timbul dan ada sekarang, sangat ditentukan oleh kualitas ide-ide. Kreativitas merupakan kata kunci para spesialis teknologi informasi *end - user* dan manajemen teknologi informasi pembangunan sosial ekonomi harus menciptakan suatu lingkungan dimana ide-ide baru itu dapat didiskusikan secara bebas. Meminjam apa yang dikatakan oleh Anthony Jay, “Perubahan bukanlah merupakan pekerjaan sampingan bagi para pemimpin, tetapi merupakan bagian integral dari ide keseluruhan, menggambarkan seseorang yang tidak pernah melakukan sesuatu sebagai pemimpin besar adalah suatu gambaran kontradiktif. Seorang pemimpin dapat mengubah peta Eropa, atau kebiasaan sarapan pagi suatu bangsa, atau struktur modal suatu perusahaan rekayasa; tetapi mengubah sesuatu adalah sentral bagi kepemimpinan, dan mengubah sesuatu sebelum orang lain mengubahnya adalah kreativitas”.

Pilihan-pilihan dengan cara yang tidak berdisiplin tentang sumber daya manusia di dalam lingkungan teknologi informasi akan mengakibatkan rendahnya pendayagunaan dan produktivitas. Pendayagunaan yang lebih tinggi dari sumber daya manusia memerlukan pendekatan yang terpadu.

#### **4. Pengaruh Media Massa Dalam Pembangunan**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa revolusi modern mendorong masyarakat ke arah modernisasi dalam aspek-aspek organisasi dan simbolis. Seluruh masyarakat pasca revolusioner mengalami pertumbuhan diferensiasi

struktural dan spesialisasi dengan berdirinya kerangka keorganisasian universalistik; perkembangan ekonomi pasar industrial atau semi industrial; perkembangan sistem stratifikasi non-tradisional dan mobilitas yang relatif terbuka dimana kriteria *achievement* secara umum dan kriteria ekonomi, pekerjaan dan pendidikan khususnya, menjadi unsur yang dominan; dan timbulnya sistem politik terpusat dan sangat birokratis. Dalam pada itu, komunikasi melalui media massa baik media cetak maupun elektronik, memberikan peranan yang cukup penting dalam suatu perubahan sosial budaya politik.

Naisbitt (1984) dan Alvin Toffler (1987) mempopulerkan istilah masyarakat informasi (*Information society*) sebagai masyarakat modern produk dari modernisasi. Menurutnya, masyarakat informasi adalah masyarakat dengan peradaban yang dicirikan oleh penggunaan elektronika, komputer, robot, optik, komunikasi dan informasi sampai ke genetika, energi alternatif, dan manufakture ruang angkasa serta perekayasa ekologis; yang kesemuanya itu merefleksikan loncatan kualitatif pengetahuan manusia yang dewasa ini sedang diterjemahkan ke dalam penerapan sistem perekonomian.

Sejalan dengan gerak lajunya modernisasi, sarana komunikasi; dalam hal ini komunikasi media massa perlu mendapat perhatian yang serius. Perencanaan dalam bidang komunikasi baik yang menyangkut *software* maupun *hardware* harus sejalan dengan gerak pembangunan. Hal tersebut dapat difahami karena komunikasi selain merupakan sarana untuk mengemukakan pendapat sehubungan dengan ide-ide pembaharuan, juga sebagai mediator yang efektif dalam menjembatani pemerintahan dengan masyarakatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, teori norma budaya melihat cara-cara media massa mempengaruhi perilaku sebagai suatu produk budaya. Pada hakekatnya, teori

norma-norma budaya menganggap bahwa media massa melalui pesan-pesan yang disampaikannya dengan cara-cara tertentu dapat menumbuhkan kesan-kesan yang oleh *audience* disesuaikan dengan norma-norma budayanya. Perilaku individu umumnya didasarkan pada norma-norma budaya yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapinya, dalam hal ini media akan bekerja secara tidak langsung untuk mempengaruhi sikap individu tersebut.

Paling sedikit tiga cara yang dapat ditempuh oleh media massa untuk mempengaruhi norma-norma budaya. Pertama, pesan-pesan komunikasi massa dapat memperkokoh pola-pola budaya yang berlaku serta membimbing masyarakat agar yakin bahwa pola-pola tersebut masih tetap berlaku dan dipatuhi masyarakat. Kedua, media dapat menciptakan pola-pola budaya baru yang tidak bertentangan dengan budaya yang ada, bahkan menyempurnakannya. Ketiga, media massa dapat mengubah norma-norma budaya yang berlaku dengan perilaku individu-individu dalam masyarakat diubah sama sekali. Mengenai besarnya pengaruh media terhadap norma-norma budaya memang masih harus lebih banyak dibuktikan lewat penulisan-penelitian yang intensif. Menurut Lazarsfeld dan Merton, media sebenarnya hanya berpengaruh dalam memperkokoh norma-norma yang berlaku, tetapi tidak membentuk norma budaya baru. Mereka beranggapan bahwa media bekerja secara konservatif dan hanya menyesuaikan diri dengan norma budaya masyarakat seperti selera atau nilai-nilai, sehingga mereka tidak membentuk norma budaya baru melainkan memperkuat “status quo” belaka.

Dalam keadaan tertentu media massa memang mampu menumbuhkan norma-norma budaya baru. Misalnya kebiasaan membaca yang berkembang dengan pesat akibat penyebaran surat kabar, minat menikmati siaran radio bertambah besar akibat perluasan jaringan radio sampai ke pelosok desa. Selain itu,

penampilan televisi memberikan suasana baru bagi interaksi keluarga yang memanfaatkannya sebagai sarana hiburan di dalam keluarga. Persoalan yang muncul kemudian, apakah media massa mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku yang telah mapan? Hal tersebut merupakan persoalan yang tidak sederhana. Banyak anggapan yang menyangkal kenyataan bahwa media massa cukup potensial dalam merubah perilaku yang telah mapan. Misalnya, kampanye imunisasi bebas polio melalui media televisi yang dilakukan oleh Rano Karno dan kawan-kawan cukup efektif menyentuh masyarakat dalam mensukseskan gerakan imunisasi bebas polio dari pemerintah. Kampanye-kampanye gerakan cinta damai yang dilakukan oleh kelompok anak bangsa, memberikan pengaruh psikologis terhadap masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa media massa dapat mengukuhkan norma-norma budaya dengan informasi-informasi yang disampaikan setiap hari. Selain itu, media massa dapat mengaktifkan perilaku tertentu apabila informasi yang disampaikannya sesuai dengan kebutuhan individu serta tidak bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Media massa bahkan dapat menumbuhkan norma budaya baru dalam perilaku selama norma tersebut tidak dihalangi oleh hambatan-hambatan sosial budaya. Sebagai contoh, penayangan berbagai iklan dengan berbagai bentuknya mendorong masyarakat ke arah konsumtif. Namun ketika media massa menyuguhkan informasi yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat, maka masyarakat akan segera memberikan berbagai reaksi yang membawa kepada konflik antara pro dan kontra. Sebagai contoh, dewasa ini media massa cetak sedang dihebohkan oleh masalah penayangan pornografi. Hal tersebut cukup menghebohkan masyarakat, walaupun dengan dalih kebebasan apa pun penayangan pornografi

belum dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Keraguan yang masih timbul dikalangan para ahli adalah yang menyangkut persoalan benarkah bahwa tanpa bantuan atau dukungan faktor-faktor lain media massa mampu merangsang perubahan? Dengan perkataan lain media massa tidak mempengaruhi secara mendalam norma-norma yang telah melembaga. Kesimpulan ini, sebagaimana persoalan-persoalan lainnya mengenai pengaruh media bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan pembuktian-pembuktian data.

Menurut teori persuasi, cara-cara komunikasi massa dalam mempengaruhi perilaku individu telah menumbuhkan usaha-usaha lain untuk menyusun konsep yang berhubungan dengan manipulasi informasi melalui pesan-pesan komunikasi. Berdasarkan teori ini, pesan-pesan komunikasi akan efektif dalam persuasi apabila memiliki kemampuan berubah secara psikologis minat atau perhatian individu dengan cara sedemikian rupa sehingga individu menanggapi pesan-pesan komunikasi sesuai dengan kehendak komunikator. Dengan kata lain, kunci keberhasilan persuasif terletak pada kemampuan memodifikasi struktur psikologis internal dari individu sehingga hubungan psikodinamik antara proses internal dengan perilaku yang diwujudkan akan sesuai dengan kehendak komunikator. Sebagai contoh, dalam kampanye partai politik yang belakangan ini marak, dapat kita lihat dan rasakan dengan jelas bagaimana upaya para elit politik dari berbagai partai berlomba-lomba meraih perhatian masyarakat melalui berbagai saluran media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Selain itu, dunia periklanan dengan berbagai bentuk dan coraknya menawarkan produknya kepada masyarakat yang dibarengi dengan hadiah-hadiah yang cukup menggiurkan. Kesemuanya itu merupakan upaya-upaya persuasif melalui

manipulasi informasi sedemikian rupa untuk meraih simpati masyarakatnya agar masyarakat dapat memilih atau membeli apa yang ditawarkan. Demikian pula halnya dengan pembangunan. Pesan-pesan pembangunan tidak sedikit yang disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai media massa, agar masyarakat menerima dan mendukung gerak pembangunan dalam setiap aspek kehidupan yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

## KESIMPULAN

Dalam proses komunikasi disebarkan suatu ide (lama ataupun baru) yang diharapkan dapat diterima oleh komunikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Ide pembaharuan dalam konsep pembangunan tidak mudah menggantikan atau menggeser ide/nilai lama yang sudah tertanam di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka media massa sangat diharapkan kehadirannya untuk menempati posisi strategis dan menjalankan peranannya untuk dapat mencegah terjadinya konflik-konflik di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama yang didalamnya berlangsung proses kehidupan sosial. Heterogenitas dalam suatu masyarakat menunjukkan adanya kelas-kelas sosial. Heterogenitas dan kelas sosial warga masyarakat inilah yang cenderung menjadi kriteria atau ukuran dalam menilai tingkat modernitas masyarakat yang bersangkutan. Realita heterogenitas ini merupakan perwujudan tingkat kebudayaan.

Kebudayaan adalah hasil kreasi suatu masyarakat yang ditujukan pada kepentingan kehidupan masyarakat tersebut agar tetap eksis dan berkembang. Kebudayaan selalu mengalami perubahan, baik perubahan yang bersifat lambat (evolusi) maupun perubahan yang bersifat cepat (revolusi). Perubahan sosial budaya

terjadi karena adanya dorongan dari berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun yang berasal dari luar masyarakat. Gerakan perubahan secara revolusioner pertama kali tampil dalam revolusi-revolusi besar di Eropa. Revolusi-revolusi tersebut telah mempengaruhi gambaran diri (*self image*) masyarakat modern. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Bangsa Barat telah membawa bangsa-bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan dunia, pembukaan dan pendudukan serta penjajahan daerah-daerah di Amerika, Australia, Afrika, dan Asia. Penguasaan dan kontak budaya, selain telah memperkaya bangsa-bangsa penjajah dan mempermiskin bangsa-bangsa terjajah, juga memperkenalkan secara terbatas kepada penduduk setempat ilmu pengetahuan yang menjadi sumber kekuatan mereka.

Komunikasi melalui media massa baik media cetak maupun elektronik, memberikan peranan yang cukup penting dalam suatu perubahan sosial budaya politik. Sejalan dengan gerak lajunya modernisasi, sarana komunikasi; dalam hal ini komunikasi media massa perlu mendapat perhatian yang serius. Perencanaan dalam bidang komunikasi baik yang menyangkut *software* maupun *hardware* harus sejalan dengan gerak pembangunan.

Media massa dapat mengukuhkan norma-norma budaya dengan informasi-informasi yang disampaikan setiap hari. Selain itu, media massa dapat mengaktifkan perilaku tertentu apabila informasi yang disampaikannya sesuai dengan kebutuhan individu serta tidak bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Media massa bahkan dapat menumbuhkan norma budaya baru dalam perilaku selama norma tersebut tidak dihalangi oleh hambatan-hambatan sosial budaya. Selain itu, Pesan-pesan pembangunan tidak sedikit yang disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai media massa, agar masyarakat

menerima dan mendukung gerak pembangunan dalam setiap aspek kehidupan yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Dalam mengembangkan dan menerapkan strategi kompleks teknologi informasi, harus diperhatikan secara memadai mengenai pengaruh perubahan besar yang diberlakukan terhadap sumber daya manusia yang merupakan investasi utama.

## Daftar Pustaka

- Abizar. 1988. *Komunikasi Organisasi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. P2LPTK. Jakarta.
- Black, C.E.. 1966. *The dynamics of Modernization*. Harper and Row Publishers. New York.
- Depari, Eduard dan MacAndrews Colin. 1991. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Effendi, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Ctra Aditya Bakti. Bandung.
- Eisenstadt, S.N., 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar – Konsep – Posisi*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- Kreeps, G.L. 1986. *Organizational Communication: Theory and Practice*. New York & London Inc.
- Manan, Imran. 1989. *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. P2LPTK. Jakarta.
- Mulyana, Deddy (ed). 1998. *Komunikasi Organisasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Naisbitt. J.. 1984. *Megatrends*. Warner Books. New York.
- Nelson, Richard dan Jones. *Human Relations Skills*. Alih Bahasa Prihatono R Bagio. 1992. *Cara Membina Hubungan yang Baik dengan Orang Lain*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Newcomb, Theodore. M. et. All. *Social Psychology: The Study of Human Interaction*.
- Holt Rinehart and Winston Inc. New York, Chicago. San Francisco, Toronto, London. Alih Bahasa Noesjirwan Joesoef, dkk. 1985. *Psikologi Sosial*. Diponegoro. Bandung.
- Rahmat, Jalaluddin. 1984. *Psikologi Komunikasi*. Karya Remaja. Bandung.
- Schoorl.J.W.. 1981. *Modernisasi*. Gramedia. Jakarta.
- Spindler.L.. 1975. *Culture Change and Modernization*. Holt Rinehart and Winston. New York.
- Toffler, Alfin. 1987. *Kejutan dan Gelombang*. Panca Simpati. Jakarta.
- Uday, Parek. 1984. *Perilaku Organisasi: Pedoman ke Arah Pemahaman Proses Komunikasi Antarpribadi dan Motivasi Kerja*. Pustaka Binama Pressindo. Jakarta.
- Woods,C.M.. 1975. *Culture Change*. W.C.B. Dubuque.